MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3,4 dan 5
JL Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 – By Pass Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Telp. (021) 29079176 Ext. 1521, Fax. (021) 29079201

Nomor : 203/DJU/HM02.3/2/2023 Jakarta, 6 Februari 2023
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Pengumuman Lomba Bagi Satuan Kerja
Di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2023

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

Untuk menciptakan semangat berinovasi serta meningkatkan integritas Aparatur Peradilan dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat pencari keadilan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum akan menyelenggarakan beberapa lomba. Adapun lomba yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Lomba Layanan Pengadilan

a. Tema yang diusung **"Mendorong peningkatan integritas dan transparansi pengadilan melalui Layanan Pengadilan yang inovatif"**
b. Waktu pelaksanaan : Bulan Maret 2023 s.d Akhir Tahun 2023
c. Proses Pelaksanaan : berdasarkan usulan Pengadilan Tinggi
d. Proses Penilaian Awal :
Pengusulan oleh Pengadilan Tinggi yang dilengkapi data dukung :

1) Video Profil Pengadilan terbaru dengan durasi maksimal 5 menit yang menampilkan
   - Layout PTSP,
   - Sarana Prasarana PTSP,
   - Jam layanan,
   - Maklumat Pelayanan,
   - Standar Layanan,
   - Kompensasi Layanan,
   - Perangkat Survei,
   - Sarana Prasarana Disabilitas,
   - Petugas PTSP,
   - Dan Inovasi PTSP yang diunggulkan oleh Pengadilan.
2) Periode waktu pengunggahan video ke Youtube dimulai pada bulan Januari sampai dengan 31 Maret 2023.
3) Dokumen dan publikasi Standar layanan sesuai dengan Permenpan-RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
4) Screenshoot seluruh Standar Layanan yang sudah diinput pada aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN).
5) Laporan bulanan hasil monev masing-masing penanggungjawab PTSP ke pejabat pengelola PTSP (6 bulan terakhir).
6) SK pelaksana layanan PTSP.

Balai Sertifikasi Elektronik
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

7) Laporan bulanan hasil pengawasan oleh Pengawas PTSP kepada Ketua Pengadilan (6 bulan terakhir).
8) Hasil Survei (SPAK, SKM dan Survey Harian) serta tindak lanjut periode Tahun 2022 yang terpublikasi di website pengadilan.
9) Screenshoot banner atau media lainnya terkait dengan “anti gratifikasi” dan “informasi pengaduan” di lokasi pelayanan publik.
10) Penerapan layanan di Mall Pelayanan Publik (jika ada).
11) Kebijakan / program kegiatan / inovasi yang terkait dengan peningkatan integritas Aparatur Pengadilan.
12) Screenshoot bukti interaksi melalui media sosial Pengadilan (Instagram, Facebook, twitter, dll), berupa postingan layanan Pengadilan maupun percakapan dengan pencari keadilan.
13) Screenshoot nilai google review minimal 4 bintang dari skala 5 bintang.
14) Uraian inovasi layanan yang menjelaskan alasan adanya inovasi dan tujuan serta manfaat inovasi.
15) Foto dokumentasi sarana prasana / fasilitas untuk kaum rentan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas, yaitu antara lain :
    - Ruang Sidang Inklusi
    - Form Penilaian Personal
    - Loket / Antrian Prioritas
    - Alat Bantu Jalan
    - Lahan Parkir Disabilitas
    - Kursi Tunggu Prioritas
    - Toilet Khusus Disabilitas
    - Guiding Block dan Warning Block
    - Ramp / Jalur Landai
    - Rambu / Papan Petunjuk Informatif
    - Media / alat lainnya yang dapat membantu penyandang disabilitas dalam menerima layanan di pengadilan.
16) Dokumen MoU Kerjasama dengan Lembaga Organisasi Penyandang Disabilitas.
17) Dokumentasi pelatihan Petugas untuk memberikan layanan terhadap Kaum Rentan.
18) Dokumentasi Sosialisasi Buku Saku Panduan Layanan Bagi Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
19) Testimoni dari Penyandang Disabilitas yang telah menerima layanan dari pengadilan.
20) Penghargaan yang telah diraih dalam menerapkan layanan bagi penyandang disabilitas baik dari Mahkamah Agung ataupun instansi lainnya.
21) Inovasi yang telah diterapkan dalam memberikan layanan terhadap Kaum Rentan.

Balai Sertifikasi Elektronik
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
  “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”

2. Penilaian Administrasi Perkara dan Keuangan Perkara

a. Penilaian Administrasi Perkara

Unsur yang dinilai pada penilaian Administrasi Perkara antara lain:

1) Pelaporan elektronik dilaporkan taat, tepat waktu dan benar / sesuai
2) SIPP : keakuratan, kelengkapan dan tepat waktu
3) Kesesuaian antara data pada SIPP dengan kondisi rill
4) Sinkronisasi SIPP
5) Pelaksanaan Delegasi :
   - Penunjukan pelaksana relaas
   - Penyampaian relaas
   - Pengiriman asli relaas ke Pengadilan Negeri Pengaju
   - Upload kelengkapan dokumen secara lengkap dan tepat waktu
6) Pelaksanaan monev sesuai surat Dirjen Badilum Nomor 352/DJU/HM.02.3/3/2021 hal Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP
7) Penataan arsip berkas perkara dan kelengkapan sarana prasarana
8) Upload dokumen elektronik berita acara sidang, relaas, putusan, putusan yang di anonimisasi.
9) Upload dokumen ketentuan peminjaman berkas perkara pada ruang arsip

b. Penilaian Keuangan Perkara

Penilaian awal berdasarkan keakuratan data dan ketepatan waktu pada pelaporan elektronik serta keakuratan data pada Komdanas.

Unsur yang dinilai pada penilaian Keuangan Perkara antara lain:

1) Kesesuaian antara data pada komdanas dengan dokumen sumber
2) Kesesuaian antara data pada SIPP dengan berita acara penutupan kas
3) Pelaksanaan monev sesuai surat Dirjen Badilum Nomor 352/DJU/HM.02.3/3/2021 hal Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP
4) Kesesuaian pencatatan denda, subsidair dan data keuangan lainnya antara SIPP dan Putusan
5) Proses pengembalian sisa panjar dan publikasi sisa panjar pada website dan papan pengumuman
6) Pencatatan dan pelaporan terhadap pengembalian uang panjar yang perkaranya tidak dapat ditindaklanjuti / ditolak pendaftarannya.
7) Biaya proses dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban seperti bukti pertanggungjawaban biaya persidangan setempat, biaya pemanggilan / pemberitahuan melalui media cetak, biaya eksekusi dan biaya konsinyasi
8) Sudah mengidentifikasi sisa saldo keuangan perkara berdasarkan nomor perkara

3. Pemberian Penghargaan Untuk Evaluasi Kinerja dan Penjaminan Mutu Pelayanan Peradilan.

Kategori :

a. PT terbaik, kriteria dan penilaian dilakukan oleh Ditjen Badilum
b. PN terbaik dengan kriteria penilaian awal :
   - Nilai evaluasi kinerja dan penjaminan mutu pelayanan peradilan
   - Sosialisasi APM PN yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri
   - Tingkat pemahaman pelaksanaan akreditasi pada struktur APM PN dan seluruh jajarannya
   - Pengelolaan dokumen akreditasi
c. Nilai evaluasi kinerja dan penjaminan mutu layanan peradilan yang terbaik
d. Tingkat pemahaman pimpinan dan seluruh jajarannya

Balai Sertifikasi Elektronik
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

e. Pengelolaan dokumen – dokumen
f. Pemahaman / tersosialisasikannya regulasi yang baru (yang harus diketahui oleh PT dan PN)
g. Pelayanan yang sudah sesuai standard an regulasi yang berlaku
h. Kinerja seluruh jajaran satuan kerja yang sudah baik

4. Pemilihan Role Model diantara pimpinan

Untuk tingkat PN diusulkan oleh PT maksimal 3 orang pimpinan PN, dengan memperhatikan kriteria awal :

a. Kepemimpinan
b. Penghargaan yang diperoleh satker-satker dibawah kepemimpinan calon role model, baik dari eksternal maupun internal
c. Responsif terhadap kebijakan lembaga (sosialisasi dan tindaklanjut)
d. Inovatif
e. Kerjasama dan koordinasi baik dengan pihak internal maupun eksternal
f. Birokrasi pelayanan :
   - Akuntabel
   - Kompeten
   - Harmonis
   - Loyal
   - Adaptif
g. Memiliki integritas yang baik
h. Pro aktif dalam tugas, fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelayanan
i. Pencapaian nilai EIS
j. Berperan aktif dalam meningkatkan ketertiban administrasi perkara

5. Penilaian Pelaksanaan e-Litigasi

a. Pengadilan Negeri

1) Nama Pengadilan Negeri yang diusulkan oleh Pengadilan Tinggi
2) Sosialisasi e-Litigasi dilaksanakan kepada para pihak internal dan eksternal
3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik
4) Jumlah putusan yang dikeluarkan secara elektronik

b. Hakim

1) Nama Hakim yang diusulkan oleh Pengadilan Tinggi
2) Banyaknya putusan yang dikeluarkan secara elektronik
3) Banyaknya perkara yang disidangkan secara e-Litigasi
4) Verifikasi dokumen elektronik oleh Majelis Hakim

Balai Sertifikasi Elektronik
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

6. Penilaian Pelaksanaan layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu

a. Posbakum
   1) Inovasi yang dilaksanakan POSBAKUM pada Pengadilan Negeri yang diusulkan
   2) Publikasi dan sosialisasi
   3) Proses seleksi OBH pada POSBAKUM
   4) Pembinaan POSBAKUM oleh Panmud Hukum
   5) Laporan dan Monev
   6) Pemahaman petugas posbakum dan aparat pengadilan terkait (ketua, panitera, panmud)

b. Sidang diluar gedung pengadilan
   1) Inovasi layanan hukum sidang diluar gedung pengadilan bagi masyarakat kurang mampu
   2) Publikasi dan sosialisasi layanan hukum sidang diluar gedung pengadilan kepada pihak internal maupun eksternal pada Pengadilan Negeri yang diusulkan
   3) Koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain
   4) Perencanaan pelaksanaan dan penganggaran

c. Prodeo
   1) Inovasi yang dilakukan oleh PN untuk optimalisasi layanan hukum prodeo bagi masyarakat kurang mampu
   2) Publikasi dan sosialisasi ke pihak eksternal / masyarakat maupun internal selain melalui PTSP pada Pengadilan Negeri yang diusulkan
   3) Penganggaran / Rencana anggaran
   4) Pemahaman terkait pelaksanaan prodeo
   5) Monitoring dan evaluasi

Pengusulan untuk satuan kerja yang diikutsertakan dalam lomba harus melalui seleksi Pengadilan Tinggi terlebih dahulu dengan jumlah satuan kerja yang diusulkan sebagaimana tabel terlampir. Untuk lomba pelaksanaan layanan hukum satuan kerja yang diusulkan adalah yang memiliki anggaran Posbakum, Sidang diluar gedung Pengadilan dan Prodeo. Pengusulan lomba dilakukan secara elektronik tanpa harus mengirimkan usulan manual melalui link sebagai berikut :

No	Usulan	Link	Keterangan
1.	Pengusulan Satuan Kerja oleh Pengadilan Tinggi	bit.ly/lomba_badilum_2023	Diinput oleh PT
2.	Pengiriman Data Dukung Lomba Layanan Pengadilan	bit.ly/ptsp_badilum_2023	Diinput oleh PT
3.	Pengiriman Data Dukung Lomba Administrasi Perkara dan Keuangan Perkara	bit.ly/perkara_badilum_2023	Diinput oleh PT
4.	Pengiriman Data Dukung Lomba Pemilihan Role Model diantara Pimpinan	bit.ly/rolemodel_badilum_2023	Diinput oleh PT
5.	Pengiriman Data Dukung Lomba Pelaksanaan E-Litigasi	bit.ly/elitigasi_badilum_2023	Diinput oleh PT
6.	Pengiriman Data Dukung Lomba Layanan Hukum	bit.ly/lankum_badilum_2023	Diinput oleh PT

Balai Sertifikasi Elektronik
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Pengadilan Tinggi secara otomatis diikutsertakan dalam lomba tersebut diatas kecuali e-litigasi dan layanan hukum.

Batas waktu pengiriman usulan lomba tersebut diatas selambat-lambatnya sampai dengan tanggal **31 Maret 2023**.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG RI

BAMBANG MYANTO

Balai Sertifikasi Elektronik

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

TABEL USULAN LOMBA

PER WILAYAH PENGADILAN TINGGI

No	Pengadilan Tinggi	Kelas Pengadilan					Total Usulan
		PT	I A Khusus	I A	I B	II	
1.	Pengadilan Tinggi Banda Aceh	1	-	1	1	2	5
2.	Pengadilan Tinggi Medan	1	1	1	2	1	6
3.	Pengadilan Tinggi Padang	1	-	1	1	2	5
4.	Pengadilan Tinggi Riau	1	-	1	1	1	4
5.	Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau	1	-	1	-	1	3
6.	Pengadilan Tinggi Jambi	1	-	1	1	1	4
7.	Pengadilan Tinggi Palembang	1	1	1	1	1	5
8.	Pengadilan Tinggi Bengkulu	1	-	1	1	1	4
9.	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	1	-	1	1	1	4
10.	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	1	-	1	1	1	4
11.	Pengadilan Tinggi Jakarta	1	5	-	-	-	6
12.	Pengadilan Tinggi Bandung	1	2	1	2	1	7
13.	Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	1	2	1	2	1	7
14.	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	1	-	1	1	1	4
15.	Pengadilan Tinggi Surabaya	1	2	1	2	2	8
16.	Pengadilan Tinggi Banten	1	1	1	-	1	4
17.	Pengadilan Tinggi Denpasar	1	-	1	1	2	5
18.	Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat	1	-	1	1	1	4
19.	Pengadilan Tinggi Kupang	1	-	1	1	2	5
20.	Pengadilan Tinggi Pontianak	1	-	1	1	1	4
21.	Pengadilan Tinggi Palangkaraya	1	-	1	1	1	4
22.	Pengadilan Tinggi Banjarmasin	1	-	1	1	1	4
23.	Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	1	-	1	1	1	4
24.	Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara	1	-	-	1	1	3
25.	Pengadilan Tinggi Manado	1	-	1	1	1	4
26.	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	1	-	1	1	1	4
27.	Pengadilan Tinggi Makassar	1	1	1	2	2	7
28.	Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat	1	-	1	-	1	3
29.	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara	1	-	1	1	1	4
30.	Pengadilan Tinggi Gorontalo	1	-	1	1	1	4
31.	Pengadilan Tinggi Ambon	1	-	1	-	1	3
32.	Pengadilan Tinggi Maluku Utara	1	-	1	-	1	3
33.	Pengadilan Tinggi Jayapura	1	-	1	-	1	3
34.	Pengadilan Tinggi Papua Barat	1	-	-	1	1	3
Jumlah		**34**	**15**	**31**	**32**	**39**	**151**

Balai Sertifikasi Elektronik

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"